

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Tanpa adanya transaksi, maka laporan keuangan tidak dapat dilakukan. Laporan keuangan disusun untuk dilaporkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah selama satu periode. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah ialah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari oungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan sebagai pertanggungjawaban yang berisikan informasi untuk entitas yang berkepentingan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Sebelum menjadi laporan keuangan, Pemerintah bersama Anggota Dewan umumnya menetapkan APBN/APBD yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur LRA antara lain sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan oenggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup LO antara lain sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Transfer
 - d. Pos luar biasa
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur laporan arus kas antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Adanya APBD maka kegiatan pemerintahan diharapkan dapat terarah dan sesuai yang diinginkan sehingga pencapaian target yang diinginkan bisa terwujud.

Menurut Mahsun, dkk. (2011:81), “APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode anggaran sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Waktu pemberlakuan APBD diberlakukan selama satu tahun dan tidak lebih sehingga pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah bisa lebih optimal.

Menurut Phaureula dan Emy (2018:7), “APBD adalah alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya akan dirasakan masyarakat langsung”. APBD disusun bersama anggota dewan perwakilan rakyat sehingga saat penyusunan APBD terjadi pembuatan program yang merupakan usulan dari anggota perwakilan rakyat. Usulan tersebut umumnya diajukan atas aspirasi dari suatu kelompok yang menyangkut kepentingan masyarakat sehingga perlu diangkat.

APBD bersifat perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah agar kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini selaras dengan pernyataan Halim dan Kusufi (2014:36) :

APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu periode anggaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa APBD yaitu rencana keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dirumuskan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk 1 tahun terhitung 1 Januari sampai 31 Desember dan diatur dalam peraturan daerah. APBD juga dapat menjadi indikator penilaian atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dipengaruhi atas nilai pendapatan dan belanja yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut PSAP No. 2 Paragraf 7, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 untuk belanja Pemerintah Provinsi di klasifikasikan sebagai bentuk :

- **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

- **Belanja Modal**

Belanja modal sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain :

- Tanah
- Gedung
- Bangunan
- Peralatan
- aset tak berwujud

- **Belanja Tak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga meliputi antara lain :

- Bencana Alam
- Bencana Sosial

- **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2009:294) “Kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan”. Mahsun (2014:25) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi”.

Kinerja keuangan merupakan suatu penilaian atas pencapaian suatu pekerjaan dalam mengolah keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dengan adanya kinerja keuangan, evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan perbaikan atas program dapat diatasi. Penerimaan dan pengeluaran dalam keuangan perlu diperhatikan agar penunjang pekerjaan dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Menurut Halim (2012:212), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah yaitu salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang mana penilaiannya menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian 2010).

Salah satu cara mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ialah menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis ini ditujukan untuk mengukur seberapa besar penilaian atas laporan keuangan pada pemerintah daerah, terkhusus Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan

asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 2010: 99).

- a) Kemampuan struktural organisasinya Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- c) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.
- d) Kemampuan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121)

- a) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Halim (2007:230), pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur :

- a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.4.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a) Indikator Masukan (*Inputs*) Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- b) Indikator Proses (*Process*) Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun Tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan

pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

- c) Indikator Keluaran (*Output*) Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- d) Indikator Hasil (*Outcome*) Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai
- e) Indikator Manfaat (*Benefit*) Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
- f) Indikator Dampak (*Impact*) Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Analisis Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan pada dasarnya karena ingin mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah pemerintah dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Analisis Laporan Keuangan menurut Harahap (2009:190) sebagai berikut: Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Sedangkan Analisis Laporan Keuangan menurut Munawir (2010:35) sebagai berikut: Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan keadaan keuangan pemerintah dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil.

2.1.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, dimana dalam menganalisis laporan keuangan sebenarnya mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2014:68) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Sedangkan tujuan analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:31) adalah “alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan“. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu pemakai informasi atau pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasikan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.1.5.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan

Keuangan Metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk menentukan serta mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat dimengerti oleh para pemakai informasi. Metode Analisis Laporan Keuangan menurut Munawir (2010:36) sebagai berikut: Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis horisontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lain dalam laporan keuangan tersebut sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan

2.1.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Horne dalam Faud (2016:137), "Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya". Sedangkan menurut Faud (2016:137), ia menggambarkan analisis rasio sebagai berikut:

Angka-angka yang ada dilaporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Angka-angka ini akan menjadi lebih berguna apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya, kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, sedangkan analisis rasio digunakan untuk membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan membagi satuan angka dengan angka lainnya. Jika digabungkan maka analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Atas penjelasan tersebut, pengertian analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk membandingkan komponen laporan keuangan guna melihat kinerja keuangan. Rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja dan rasio pertumbuhan.

2.1.6.2 Analisis Varians (Selisih)

Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Menurut penelitian Christians (2013) Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat penting. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca dapat mengetahui secara langsung besarnya varians pada presentasinya. Selisih anggaran dibedakan menjadi dua jenis, selisih disukai (*favourable varians*), dalam hal ini realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya. Lalu selisih yang tidak

disukai (*unfavour variance*), dimana hal ini berarti realisasi belanja melebihi anggarannya. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians adalah menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran (apakah selisih anggaran dan realisasi dinilai signifikan atau tidak. Jika tidak dapat diabaikan, jika signifikan maka perlu dianalisis lebih lanjut), menentukan tingkat varians (selisih) anggaran yang bisa ditoleransi (berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dalam batas wajar), dan mencari penyebab terjadinya selisih anggaran.

2.1.6.3 Rasio Pertumbuhan Belanja

Menurut Faud (2016:143), “Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode selanjutnya”. Rasio ini dapat melihat perbedaan antara nilai keuangan saat ini dengan nilai keuangan sebelumnya dalam rangka melihat perkembangan pada pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup suatu daerah.

Analisis Pertumbuhan Belanja Menurut PSAP No. 2 Paragraf 7, “semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.” Analisis ini berguna untuk mengetahui perkembangan belanja tahun ke tahun. Belanja memiliki kecenderungan yang selalu naik. Alasan kenaikan ini belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukup layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. rumus rasio pertumbuhan pendapatan yaitu :

$$R = \frac{\text{Belanja Th } t - \text{Belanja Th } (t-1)}{\text{Belanja Th } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Pertumbuhan

Kategori	Kriteria pertumbuhan
PAD sebelumnya < PAD berikutnya	Positif
PAD sebelumnya > PAD berikutnya	Negatif

Sumber : Mahmudi, (2016:143)

2.1.6.4 Analisis Rasio Keuangan pada Belanja

2.1.6.4.1 Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2016:160), “Rasio keserasian adalah rasio yang dapat mengetahui keseimbangan antar belanja”. Menurut Abdul Halim (2012:221-234), bahwa “Untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa dengan rasio belanja modal yang relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan di daerah”. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Menurut Mahmudi (2016:162), “Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah”. Belanja operasi cenderung manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran atau jangka pendek dan sifatnya rutin atau berulang. Rasio ini berisikan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Menurut Abdul Halim (2012:236), “Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/ operasi maka persentase belanja investasi/ modal untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil”.

Menurut Mahmudi (2016:162), “Proporsi belanja operasi dengan belanja daerah sebesar 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah”. Rumus Rasio Belanja Operasi :

$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$
--

b. Rasio Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2016:162), “Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah”. Rasio ini menjelaskan porsi belanja daerah dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal cenderung memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah 5-20% (Mahmudi, 2016:162). Jumlah belanja modal cenderung lebih kecil dari pada jumlah pada belanja operasi sehingga perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Rumus rasio belanja modal yaitu:

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

2.1.6.1.2 Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:151), “Rasio efisiensi belanja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah”. Rasio ini menjelaskan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target dengan menekan pengeluaran daerah. “Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah”, (Mardiasmo, 2013:112). Semakin kecil rasio efisien maka kinerja pemerintah daerah dianggap baik. Sebaliknya, semakin besar rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah dianggap kurang baik atau buruk.

Menurut Mahmudi (2016:151), rumus rasio efisiensi belanja adalah:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi dapat diukur dengan persentase sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Efisiensi

Kriteria efisiensi	Presentasi efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Abdul Halim dalam Wita Liantino (2018:4)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini di khususkan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. Guna mengetahui kinerja Provinsi di Indonesia, maka penelitian ini dilakukan. Adapun penelitian terdahulu terkait dengan kinerja keuangan dan analisis laporan keuangan , sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta	X_1 : Rasio Kemandirian X_2 : Rasio Efektifitas X_3 : Rasio Efisiensi X_4 : Rasio Keserasian X_5 : Rasio Pertumbuhan X_6 : Rasio Kemampuan dan pengembalian pinjaman Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan ini masih kurang dalam aspek kemandirian sebesar 15,83% (2010). 22,44 (2011). 2. Rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010), dan 13,07% (2011). 3. Rasio efektivitas 94,81% (2010), 102,79 (2011). 4. Rasio efisiensi 27,95% (2010, 14,15% (2011). 5. Pertumbuhan PAD cukup tinggi 58,93% (2010), naik 19,92 %, belanja operasi naik 14,58% dan belanja moda naik 61,03%. 6. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010), 17,84% (2011)
2.	Fransiskus (2016)	Analisis Kinerja Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua	X_1 : Analisis Varians Belanja X_2 : Analisis Varians Belanja X_3 : Analisis Keserasian Belanja X_4 : Analisis Efisiensi Belanja Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitaian ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama tahun 2013-2015 varians belanja menunjukkan pada penelitian ini telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik, dimana realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya. 2. Analisis pertumbuhan belanja

				<p>mengalami kenaikan tiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya.</p> <p>3. Pada analisis keserasian be;anja pada kabupaten ini masih memberikan porsi dana yang besar untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.</p> <p>4. Pada analisis efisiesni belanja di kabupaten ini telah efisien, dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien.</p>
3.	Elizar Simambela (2016)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	<p>X_1 : Analisis Varians Pendapatan dan Belanja</p> <p>X_2 : Analisis Pertumbuhan Pendapatan</p> <p>X_3 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>X_4 : Rasio Efektivitas Efisiensi Pajak Daerah</p> <p>X_5 : Rasio Efisiensi Belanja</p> <p>X_6 : Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan</p> <p>Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah :</p> <p>1. Pada tahun 2010 – 2013 telah merealisasikan pendapatan belanja dengan cukup baik.</p> <p>2. Dalam rasio kemandirian keuangan tahun 2010-2013 juga dikatakan sudah cukup baik.</p> <p>3. Dalam merealisasikan pajak daerah pemerintah keuangan dikatakan cukup baik.</p> <p>4. Dalam rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada pemerintah daerah ini juga dikatakan cukup baik</p>

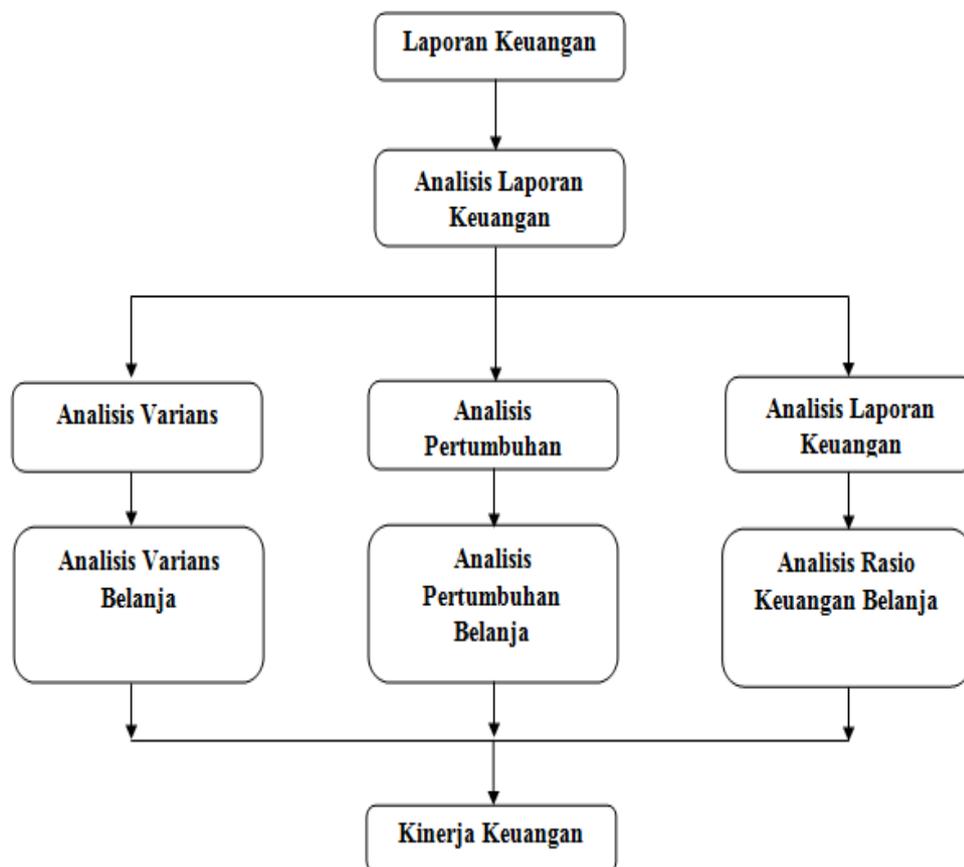
4.	Sakina Nusafira (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta	X_1 : Analisis Varians Belanja X_2 : Analisis Pertumbuhan Belanja X_3 : Analisis Keserasian Belanja X_4 : Rasio Efisiensi Belanja X_5 : Rasio Pertumbuhan X_6 : Rasio Belanja terhadap PDRB X_7 : Rasio Efektivitas Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis varians dan analisis pertumbuhan sudah berjalan dengan baik 2. Analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa dinas kebudayaan sudah melakukan harmonisasi belanja daerah 3. Pada penelitian ini juga sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran anggaran yang tidak melebihi realisasinya. 4. Kemudian secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah dinas kebudayaan ini sudah baik.
5.	Warti Ratnasari (2019)	Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Kabupaten Berau	X_1 : Analisis Varians Belanja X_2 : Analisis Pertumbuhan Belanja X_3 : Analisis Keserasian Belanja X_4 : Rasio Efisiensi Belanja Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2017 jumlah anggaran belanja (Rp10,830,810,200) dan realisasi belanja (Rp9.770.219.869) menurun pada tahun 2016 dengan anggaran (Rp14,879,889,739) anggaran (Rp12.558.626.940.2) 2. Varians belanja pada tahun 2017 (9,79%) lebih rendah dari tahun 2016 (15,60%). 3. Rasio pertumbuhan belanja pada 2017 turun sebesar 22,20%

6.	Christian Kainde (2013)	Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Biitung	X ₁ : Analisis Varians Belanja X ₂ : Analisis Pertumbuhan Belanja Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pada pemerintahan ini sudah mempunyai prosedur penyusunan anggaran yang baik, tetapi dalam pelaksanaan masih kurang efektif, pada hasil ini diketahui terdapat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. 2. Pada pertumbuhan belanja daerah dari 2009-2012 mengalami kenaikan, ini menunjukkan kinerja pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya.
7.	Andy (2016)	Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara	X ₁ : Analisis Varians Belanja X ₂ : Analisis Pertumbuhan Belanja Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Penyusunan anggaran sudah cukup baik, tapi dilihat dari pengguna anggaran kurang efektif. 2. Realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran yang ditetapkan. 3. Pertumbuhan belanja pada penelitian ini terus mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan kurs.
8.	Bahrin Assidiq (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten	X ₁ : Analisis Varians Pendapatan dan Belanja X ₂ : Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja X ₃ : Analisis Rasio Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pada varians pendapatan dan belanja sudah baik. 2. Pada pertumbuhan pendapatan dari tahun 2008-2012 sudah dikatakan baik,

			<p>Pendapatan dan Belanja Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>dan pertumbuhan belanja positif.</p> <p>3. Namun, pada kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari rasio keuangan pendapatan daerah menunjukkan bahwa derajat desentralisasi sebesar 5,03% dan kabupaten ini masih bergantung pada pemerintah. Lalu dilihat dari rasio keuangan belanja daerah menunjukkan sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, dan hanya beberapa persen untuk belanja modal.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Penulis 2020

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Kinerja Keuangan